

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Agussalim A. Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007
- Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Bandung : Mandar Maju, 1990
- Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Febriani, *Pengertian dan Tujuan Pengawasan*. Jakarta : PT. Garmedia Pustaka Utama, 2005
- George R. Terry, *Pengendalian dan Pengawasan dalam Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Hetifah Sj Sumarto ed., *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Hestu B. Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 2009
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010
- M. Ryaas Rasyid., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- M. Manullang, *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 2002
- Nasri Effendi, *Sistim Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, LAN-RI, 2009

- Nimatul Huda., *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Penerbit PT. Ghalia Indonesia, 1990
- Salamoen Soeharjo, & Nasri Effendy, 2009, *Sistim Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, LAN-RI, Jakarta, 2009
- Sujamto, *Aspek –Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Sugeng Priyatna, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang : Aneka Ilmu, 2008
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radjawali, 1985
- Syahrani dan Syahrani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009
- Syaukani, Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003
- Tjandra, W. Riawan, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- WJS. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja. dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

### **Internet-Website**

<http://swamandiri.org/2008/01/23/pengawasan-menuju-clean-government>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017

[http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/penjelasan\\_uu\\_pemda.htm](http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/penjelasan_uu_pemda.htm), diakses pada tanggal 21 Februari 2016

<http://qedo40.blogspot.co.id/2010/06/pengawasan-pusat-terhadap-daerah.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017

[id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah) diakses pada tanggal 23 Desember 2016